

## ABSTRAK

Pekerja seks komersial merupakan suatu perbuatan yang tidak dilarang dalam undang-undang, perbuatan ini termasuk dalam suatu unsur tindak pidana bahwa perbuatan yang dianggap melanggar Perundang-ndangan apabila pekerja seks komersial tersebut menjajakan dirinya lewat media online yang dianggap bahwa media tersebut yang banyak digunakan karena penggunaannya dirasa mudah dan gampang untuk digunakan. Adanya perkembangan media tersebut maka dapat dimanfaatkan oleh pekerja seks tersebut untuk mempromosikan atau menjajakan dirinya sendiri tanpa adanya perantara. Untuk Pengaturan Undang-undang yang terkait dalam perbuatan yang dilakukan oleh pekerja yang menjajakan dirinya sendiri tidak secara tegas mengatur perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tersebut. Begitu pula tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan mendapatkan jawaban perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana yang menjajakan dirinya lewat media online. Maka untuk menjawab pertanyaan skripsi ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Maka dari itu adanya penegasan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial yang menjajakan dirinya lewat media online, dengan menyebarkan konten pornografi berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi serta menggunakan media online sebagai alat dilakukannya perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008.

Kata kunci : pekerja seks komersial, media online, pertanggungjawaban pidana.

**ABSTRACT**

*a prostitute is an act that is not prohibited in the law, this act is included in an element of a crime that the act is considered violating the Act if the prostitute peddles himself through online media which is considered that the media are widely used because of its use deemed easy and easy to learn. The existence of these media developments can then be exploited by sex workers to promote or peddle themselves without intermediaries. For the regulation of laws relating to acts committed by workers who peddle themselves do not explicitly regulate the actions carried out by these prostitutes. Likewise, the purpose of writing this thesis is to find out and get answers to the actions carried out by these prostitutes, which can be said to be criminal acts and criminal liability that sell themselves through online media. So to answer the questions of this thesis using the Legislative Approach and conceptual approach. Therefore there is an affirmation in the actions carried out by commercial sex workers who peddle themselves through online media, by distributing pornographic content based on Article 4 paragraph 1 of Law Number 44 of 2008 concerning pornography and using online media as a tool to carry out such acts under Article 27 paragraph 1 of Law number 11 of 2008.*

*Keywords: Prostitute, online media, criminal liability.*

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2006 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843)